

WAJAH BARU KIRI ISLAM: STUDI GERAKAN FRONT NAHDLIYIN UNTUK KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM (FNKSDA)

M. Ubaidillah

UNU Indonesia

Menachem.ubaidillah@gmail.com

Abstrak

Implementasi pembangunan dan pengaruh atas industrialisasi seharusnya tidak dipahami sebagai apa adanya. Menurut Karl Marx dan Antonio Gramsci, agama adalah syarat Mutlaq proses kerja kapitalisme untuk meniadakan gerakan perlawanan. Hal ini membuat peran gerakan sosial menjadi penting sebagai proses penyadaran dan transformasi sosial. Arus gerakan sosial itu terus-menerus diproduksi dan memiliki dinamika sendiri. Salah satu faktor dari gerakan sosial saat ini masih berlangsung karena perlawanan terhadap kontestasi industri ekstraktif multinasional dalam mendapatkan sumber daya alam. Salah satunya adalah gerakan sosial-lingkungan oleh kelompok pemuda muncul dalam tubuh ormas Islam Nabdlatul Ulama (NU). Kurangnya kedaulatan sumber daya alam di Indonesia mendorong sekelompok pemuda NU membangun organisasi gerakan sosial-lingkungan yang berbasis jaringan dengan komunitas NU. Organisasi yang resmi berdiri pada 9 desember 2013, Awalnya muncul kritik dan kekecewaan sebagian pemuda NU terhadap kelompok NU struktural dan pemerintah. Karena kelompok elit NU yang duduk struktural dianggap kurang peka dan peduli terhadap isu kedaulatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan-sosial hidup rakyat Indonesia, khususnya warga NU.

Kata kunci: *Anak Muda NU, Gerakan Lingkungan, Organisasi Sosial.*

Pendahuluan

Post Tradisionalisme Kaum Muda Nabdlatul Ulama

Secara historis, munculnya istilah *Islam Tradisional* yang disematkan kepada NU merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Pandangan tersebut didasarkan kepada *pertama*, latar belakang warga NU yang sangat menjunjung kearifan lokal. *Kedua*, kesalahan memandang perkembangan Islam itu sendiri, yakni pengabaian beberapa kelompok terhadap kemungkinan proses perkembangan pemikiran didalam tubuh NU. Terlebih dalam perkembangannya telah terjadi banyak pergeseran corak berpikir selama kurang lebih 2 dekade terakhir. Dengan munculnya fenomena gerakan pembaharuan Islam yang hampir tidak pernah terjadi dalam sejarahnya, sebuah gerakan pembaharuan Islam yang dimotori anak muda NU.

Walaupun sampai hari ini wacana post tradisionalisme masih menjadi perdebatan panjang terkait dengan kerangka-kerangka batasan makna epistemologisnya, pada satu sisi post tradisionalisme dianggap tidak lazim karena makna post tradisionalisme sendiri bisa diartikan sebagai melampaui, menggugat, mencampakkan dan meninggalkan tradisi itu sendiri yang seakan-akan menantang semangat tradisional, atau jangan-jangan post tradisionalisme hadir hanya demi untuk menegaskan identitas tradisional kelompok muda NU yang terdidik, semakin dalam ditelisik semakin banyak memunculkan pertanyaan yang mencurigakan terkait dengan munculnya Post tradisionalisme itu sendiri, tapi setidaknya munculnya Post tradisionalisme tidak hanya dilatarbelakangi pergulatan wacana intelektual antara kaum tradisional dan modernis, disisi lain kelahiran post tradisionalisme memang sebagai hasil pergumulan panjang dari proses transformasi intelektual dengan kesadaran kritis transformatif, yang mana Post tradisionalisme sendiri tidak berpretensi untuk membangun metodologi dalam memahami Islam tapi lebih pada pemberian bingkai nalar kritis dalam memandang bangunan ortodoksi keagamaan.

Setidaknya ada beberapa hal yang melatarbelakangi dan menjadikan landasan semangat lahirnya post tradisionalisme. *Pertama*,

terjadinya kejumudan (kemandegan berfikir) dalam konteks pemikiran beragama, hal ini tidak bisa dipungkiri dengan adanya satu doktrin dengan menempatkan Islam sebagai realitas wahyu sehingga melahirkan satu paradigma keamanan bahwa Islam adalah agama wahyu yang kebenarannya menjad satu hal yang mutlak tak terbantahkan yang kemudian memunculkan satu kekhawatiran untuk merusak agama dan akidah, hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Moh Arkoun dalam tulisannya *Naqđ Al-Islam* bahwa ciri dan karakter Islam pada waktu itu:¹

1. Tunduk pada wahyu dan ortodoksinya,
2. Penghormatan pada otoritas dan keagungannya (Imam Mazhab dalam konteks Fiqih, Teologi dan Tasawuf),
3. Cara pandang tertentu atas epistemologi abad pertengahan terhadap alam semesta.

Kedua, partisipasi NU dalam dunia politik praktis (meskipun hanya diwakili beberapa orang). Terjerumusnya NU dalam dunia politik praktis banyak menyebabkan tujuan NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang berorientasi pada pengembangan potensi ummat terbengkalai. Dari kondisi inilah, kalangan muda NU prihatin terhadap terjerumusnya NU dalam pusaran politik praktis dan mereka mencoba untuk menggeser gerakan politik praktis NU ini ke gerakan Islam kultural, sebagaimana misi awal pendirian organisasi ini. *Ketiga*, permasalahan pengelolaan keorganisasian. Pola hubungan *patron-client* yang kuat antara ulama dengan masyarakat, dimana ulama berperan sebagai *patron* dan masyarakat berperan sebagai *client*, menjadikan organisasi ini lemah dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan NU yang lebih bersifat tradisional perlu diganti dengan sistem yang lebih modern, karena basis massa yang sangat besar akan sulit menunjukkan eksistensinya jika hanya dikelola dengan pola-pola tradisional.

¹ Najib Burhani, <http://nu1926.blogspot.co.id/2010/08/post-tradisionalisme-sebagai-alternatif.html> diakses pada 20 Mei 2017

Jika kita kaitkan dengan Islam, maka tradisionalisme Islam dapat diartikan sebagai praktik-praktik keagamaan maupun pemikiran dalam Islam yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun. Sedangkan post-tradisionalisme secara etimologi bisa diartikan pasca tradisionalisme. Meskipun kata post disini bisa diartikan dengan menggugat, melampaui, melewati dan bahkan meninggalkan tradisi, tetapi yang menjadi inti dari post tradisionalisme disini adalah mentransformasikan dan merevitalisasi terhadap tradisi, bukan untuk meninggalkan tradisi. Maka demikian, dalam diri postradisionalisme terkandung nilai-nilai kontinuitas dan perubahan.

FNKSDA dan Strategi Gerakan (Siluet Sejarah FNKSDA)

Berakhirnya era kolonialisme, dunia memasuki era “neo kolonialisme” dominasi dan penjajahan tidak lagi bersifat fisik dan secara langsung melainkan penjajahan tidak lagi bersifat fisik dan secara politik dan ideologi. Periode ini ditandai dengan masa kemerdekaan negara-negara dunia ketiga khususnya, Asia dan Afrika. Namun, era ini tidak terlepas dari dominasi negara-negara penjajah terhadap bekas koloni mereka. Mereka tetap melanggengkan dominasi mereka melalui kontrol terhadap teori dan proses politik yang terjadi.²

Di era ini pula kapitalisme lahir dengan berbagai paham dan teori terkait model pembangunan ekonomi baru. Negara-negara pusat kapitalis seperti Amerika dan Uni Eropa mencoba membangun sistem ekonomi kapitalis di negara Dunia Ketiga. Untuk itu, kapitalisme melakukan *grand designs* strategi ekonomi-politik global untuk mempercepat akumulasi *Capital*. Strategi tersebut diantaranya menyingkirkan rintangan investasi dengan pasar bebas, perlindungan hak milik intelektual, *good governance*, deregulasi serta penguatan *civil society*.³ Kondisi tersebut yang mendorong adanya liberalisasi serta globalisasi di negara dunia ketiga.

Menurut kelompok penganut neoliberalisme, pertumbuhan

² Mansour Fakih, *Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2002), 184

³ *Ibid.*,187

ekonomi akan dicapai maksimal jika terjadi “kompetisi bebas” antar pelaku ekonomi. Kompetisi yang agresif adalah akibat kepercayaan bahwa “pasar bebas” itu efisien untuk mengalokasikan sumber daya alam rakyat yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harga barang dan jasa selanjutnya menjadi indikator apakah SDA sudah habis atau masih tersedia banyak. Ketika harga barang murah maka barang tersebut langka dipasaran dan sebaliknya. Oleh sebab itu, orang akan menanamkan modalnya ketika harga barang tersebut tinggi. Kesimpulannya, harga jadi rumus utama apa yang harus di produksi.

Posisi negara harusnya lebih superior dari pada pasar. Negara berhak mengatur serta menetapkan regulasi terkait pengelolaan SDA-nya sendiri. Selain itu, melakukan setiap kontrol terhadap perusahaan nasional maupun transnasional yang memproduksi di wilayah negara. Di Indonesia misalnya, kondisi itu sudah tercantum dalam amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Aturan dasar negara tersebut seharusnya menjadi acuan prinsip model pembangunan di Indonesia. Penguasaan swasta terhadap sumber daya alam Indonesia harus dibatasi.

Namun, yang terjadi adalah Indonesia yang terkategori dunia ketiga juga memiliki sejarah yang erat dengan model ekonomi kapitalisme. Puncaknya, ketika keran liberalisasi ekonomi di buka lebar pada masa Orde Baru. Masa kepemimpinan Soeharto Indonesia mulai mengikuti sistem demokrasi liberal. Izin pertambangan yang sebelumnya alot diperoleh pada masa Orde Lama justru kran tersebut dipermudah pada masa Orde Baru. Hal ini berimplikasi pada munculnya banyak perusahaan tambang raksasa yang tumbuh pesat pada masa itu. Sumber hukum yang menjadi landasan gagasan arah pembangunan tersebut dipublis pada tahun 1966 melalui TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan.

Implikasinya, sektor swasta mendapat keluaasaan untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Sektor-sektor strategis seperti migas, pertambangan, bank, manufaktur dikuasai sepenuhnya oleh korporasi multinasional asing. Hal ini mengakibatkan perusahaan Indonesia bangkrut, karena tidak memiliki daya saing yang kuat. Terjadi ketimpangan sosial-ekonomi yang luar biasa akibat konglomerasi, kepemilikan tunggal. Terlebih sektor industri kecil-menengah dan pertanian nantinya akan semakin terpuruk. Jurang ketimpangan semakin menganga, yang kaya akan semakin kaya dan melanjutkan dominasi kekayaannya dan masyarakat miskin akan semakin mendekati ajalnya.

Persoalan jalan paradigma ekonomi yang dipilih oleh pemerintahan Orba memiliki dampak resiko yang berkelanjutan hingga era sekarang. Era reformasi masih dibayang-bayangi oleh utang luar negeri serta ketidakberdayaan iklim dunia usaha di Indonesia. Para Konglomerat produk pembangunan Orde Baru di era sekarang justru menguasai panggung politik, ekonomi dan media di Indonesia.⁴

Hebert Marcuse (Situmorang, 2007) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat produksi sebuah pabrik maka semakin bertambah beban kerusakan yang harus ditanggung oleh alam, termasuk manusia di dalamnya. Produksi yang sangat besar hanya akan menguntungkan kaum pemodal yang apatis terhadap rusaknya ekosistem. Selain itu, kondisi tersebut menjadikan watak masyarakat semakin konsumtif terhadap alam. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan menerapkan politik membuka kran sebesar-besarnya untuk investor asing. Negara sengaja mengkomodasi kepentingan investor asing dalam aspek keamanan asset investasi melalui penerapan sistem predatoris yang ditopang oleh birokrasi politik. Kapitalisme baru ini yang berimplikasi pada kesenjangan

⁴ Dawam Raharjo, *Pembangunan Pasca Modernis: Esai-esai ekonomi politik*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 32-36.

sosial dan rusaknya ekosistem lingkungan hidup di Indonesia.⁵

Dalam konteks inilah urgensi berdirinya organisasi masyarakat sipil terutama lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang konsen bergerak dalam isu kedaulatan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus ada. Organisasi tersebut memiliki relevansi yang kuat karena melalui mereka perdebatan pembangunan berkelanjutan dan ramah dengan alam bias dikritisi. Mereka mencoba berafiliasi dengan barisan LSM lain yang bergerak dengan permasalahan dan kepentingan yang sama. Hal ini memungkinkan mereka menjadi agen produksi dan reproduksi wacana lingkungan dan pembangunan. Mengingat sekarang ini di Indonesia sebagian besar elit politik dan pengambilan kebijakan kurang mempertimbangkan dampak sosial-ekologis. Kalaupun itu disadari, rekayasa penanggulangan dan usaha pencegahan sebagai wujud pengalihan isu. Kondisi tersebut yang menjadikan masyarakat lokal menjadi bergejolak untuk melakukan serangan fisik terhadap perusahaan pengelola SDA di wilayah mereka.⁶

Konflik sumberdaya alam dan agraria sepanjang tiga tahun terakhir menyita perhatian publik mengingat intensitas ledakannya yang cukup sering. Ada tren yang cukup kuat, konflik yang dulu bersifat laten berubah menjadi manifest. Perbedaan sistem penguasaan lahan antar pihak dalam konflik agraria tak kunjung ada kepastian. Masyarakat gigih mempertahankan hak penguasaannya secara turun-temurun dan bersifat informal, sementara perusahaan dan para pihak lain datang dengan sistem aturan formal yang tidak dikenal dalam aturan yang berlaku di masyarakat.

Sejak kemunculannya di era 1970-an, sebagai respon atas

⁵ Erwin Edaryanta, *Politik Air di Indonesia: "Sejarah Si Gedhang oleh Korporasi Aqua Danone"*. (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2007), 42.

⁶ Nanang Kurniawan, "Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia" *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM*. 2012 vol 16.

kebijakan pembangunan Orde Baru, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia telah menjadi pelopor dalam melahirkan wacana-wacana alternatif hubungan antara manusia dan lingkungan. Selain mencoba mengeksploitasi alam wacana ini mendorong agar negara, swasta maupun masyarakat sipil peduli terhadap masa depan kehidupan ekologis manusia. Data empirik menunjukkan bahwa LSM lingkungan hidup bergerak tidak dalam alur wacana tunggal. Fragmentasi wacana lingkungan terjadi sangat kuat dan dipengaruhi relasi organisasi-organisasi tersebut dengan kekuatan global melalui skema kerjasama program dan pembiayaan maupun jejaring pengetahuan.⁷

Sejauh yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia mengantungkan hajat hidupnya sebagai seorang petani. NU sebagai ormas terbesar di Indonesia memiliki 120 Juta Anggota,⁸ tentunya memiliki tanggung jawab dalam mengawal kesejahteraan mereka. Sebagai ormas terbesar, mayoritas dari warga NU adalah warga pedesaan yang bermata pencaharian sebagai petani. NU yang seharusnya menjadi pelindung warganya seakan tidak memiliki gairah menyuarakan hak-hak untuk mendapatkan kedaulatan warganya. Kedaulatan akan kesejahteraan yang didambakan tidak sesuai dengan realitas dimana ketidakberdayaan petani didepan pasar. Bahkan pencaplokan lahan oleh kapitalisme ekstraktif semakin menyensarakan akibat ketidakberdayaan petani melawan neoliberalisme pasar.

Gerakan sosial-lingkungan oleh kelompok pemuda muncul dalam tubuh ormas Islam Nahdlatul Ulama. Kondisi defisit kedaulatan sumber daya alam di Indonesia mendorong sekelompok pemuda NU membangun organisasi gerakan sosial-lingkungan yang yang berbasis jaringan dengan komunitas Nahdlatul Ulama. Organisasi tersebut yaitu Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)

⁷ *Ibid.*, 7-9.

⁸ <http://regional.kompas.com/read/2016/04/07/14013651/Buktikan.Klaim.sebagai.Ormas.Terbesar.NU.Terbitkan.Kartu.Anggota.Nasional> diakses pada 21 Mei 2017

yang resmi berdiri pada 9 Desember 2013. Awalnya FNKSDA muncul akibat dari kekecewaan sebagian pemuda NU terhadap kelompok NU struktural. Sebab, kelompok elit NU dianggap kurang peduli terhadap isu kedaulatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan-sosial hidup rakyat Indonesia, khususnya warga NU. Pemerintah dan kelompok NU struktural menurut FNKSDA kurang bertanggung jawab terhadap kedaulatan SDA serta dampak sosial-lingkungan yang ditimbulkan (Sobirin dalam Daulathijau.org, 2013)

Sebagai organisasi yang terhitung muda, FNKSDA sudah memiliki 18 cabang di seluruh Indonesia.⁹ Hal yang membedakan FNKSDA dengan Ormas dan LSM yang sama-sama memiliki kedekatan dengan NU adalah terletak dalam setiap bingkai yang meliputi FNKSDA. *Pertama*, nama yang diambil adalah “*Front*”, sesuai dengan AD/ART Pasal 1 menegaskan bahwa front adalah sekumpulan dari beberapa individu, Ormas dan LSM yang memiliki Visi dan Misi Organisasi, kemudian pasal tersebut dikuatkan kembali oleh pasal 3 item 2 yakni “*Perserikatan dan jaringan*”. Bukan hanya dia yang mengikuti proses kaderisasi dalam sebuah organisasi pada umumnya, tetapi lebih menekankan kepada kemiripan Visi dan Misi Organisasi. FNKSDA sendiri memiliki kaderisasi wajib yakni “*Pesantren Agraria/Sekolah Agraria*”. Terma “*Nahdliyin*” usai kata Front menunjukkan semangat perlawanan. Secara etimologis kata Nahdliyin memiliki makna “*Bangkit*”, tentunya tanpa dianalisis lebih jauh pasti diambil sebuah maksud yang jelas dari berdirinya organisasi. *kedua*, bukan hanya secara konsepsi gerakan tapi minim aksi. FNKSDA memberikan perhatian serius dalam AD/ART Pasal 7 dalam upaya mencapai kesadaran kolektif akan kedaulatan SDA, yakni “*Tata Milik, Tata Kelola dan Tata Guna*” yang berlandaskan UUD 1945 pasal 33. Gerakan tersebut dijelaskan dalam pasal selanjutnya yang berbicara pokok-pokok perjuangan. *Ketiga*, FNKSDA adalah berdiri sebagai “*Organisasi Masyarakat*” atau Ormas . seperti pada umumnya Ormas pasti memiliki acuan dan landasan gerakan yakni sebuah “*ideologi*”.

⁹ Hasil wawancara dengan Roy Murtadlo pada 18 Nopember 2016

Ideologi Organisasi

Meskipun substansinya tidak jauh berbeda dengan term-term lain, seperti “Islam Inklusif”, “Islam Transformatif” dan “Islam Liberal”, istilah “Islam Progresif” merupakan istilah baru dalam kajian Islam kontemporer yang digunakan oleh para akademisi dan aktivis sejak beberapa tahun ini untuk memberikan label kepada pemahaman-pemahaman dan aksi-aksi umat Islam yang memperjuangkan penegakan nilai-nilai humanis, seperti pengembangan *civil society*, demokrasi, keadilan, kesetaraan jender, pembelaan terhadap kaum tertindas dan pluralisme. Di satu sisi pandangan dan aksi Islam Progresif merupakan kelanjutan dan kepanjangan dari gerakan Islam Liberal yang muncul sejak kurang lebih seratus lima puluh tahun yang lalu. Namun, di sisi lain ia muncul sebagai bentuk ungkapan ketidakpuasan terhadap gerakan Islam Liberal yang lebih menekankan pada kritik-kritik internal terhadap pandangan dan perilaku umat Islam yang tidak atau kurang sesuai dengan nilai-nilai humanis. Sementara itu, kritik terhadap modernitas, kolonialisme dan imperialisme justru tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari gerakan Islam Liberal.

Kenyataan inilah yang memberikan inspirasi terhadap munculnya pemahaman dan aksi Islam Progresif, yang memberikan perhatian yang seimbang antara kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal terhadap tradisi pemikiran sebagian umat Islam yang tidak menitikberatkan pada aspek-aspek kehidupan humanis memosisikan gerakan Islam Progresif pada gerakan modernis, namun pada waktu yang bersamaan ia juga merupakan gerakan “postmodernis”, karena ia juga bersikap kritis terhadap modernitas yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sejati dan kemanusiaan. Cara pandang, kritis dan aksi Islam Progresif semuanya hendaknya berorientasi kepada kemajuan. Atas dasar inilah ia disebut dengan istilah ‘progresif’.¹⁰ Point disini membahas secara singkat model-model

¹⁰ Farish A Noor, *Islam Progresif: Peluang, Tantangan, dan Masa Depan di Asia Tenggara*. Terj. Moch. Nur Ichwan dan Imron Rosyadi. (Yogyakarta: SAMHA, 2006). 23

pemikiran dan gagasan progresif yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir Muslim dari beberapa negara, sehingga kita mendapatkan gambaran umum mengenai karakteristiknya. Artikel ini juga akan mencoba mengeksplorasi bagaimana pandangan-pandangan tersebut dapat membumi di Negara Indonesia.

Pemikiran Islam progresif digagas di atas pondasi premis-premis tertentu yang dilahirkan atau disarikan dari ayat-ayat al-Qur'an. Keseluruhan pemikiran mereka dalam berbagai masalah yang terkait dengan tiga agenda besar mereka—keadilan sosial, kesetaraan gender, dan pluralisme—merupakan ramifikasi seluas-luasnya dari premis atau asumsi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf paragraf di bawah ini.

Premis pertama, “setiap manusia, perempuan dan lelaki, muslim dan non-muslim, kaya dan miskin, Selatan dan Utara, memiliki kemuliaan intrinsik yang sama yang diberikan oleh Tuhan”. Kemuliaan intrinsik yang sama itu, menurut al-Qur'an, adalah ruh ketuhanan yang dihembuskan oleh Tuhan ke dalam diri manusia dalam proses penciptaannya.

Premis kedua yang selalu digandengkan dengan *premis ketiga*, karena keduanya *diderivasikan* dari ayat yang sama dalam al-Qur'an, masing-masing adalah “misi utama kehadiran manusia di dunia adalah untuk menjadi pejuang dan penegak keadilan (*‘adl, justice*) untuk segenap umat manusia”, dan “manusia wajib berbuat kebajikan dan berperilaku santun kepada sesama makhluk Tuhan”.

Percabangan premis di atas memiliki implikasi jauh terhadap produk pemikiran pelaku pemegang ideologi Islam progresif dan bagaimana mereka berpegang secara kritis terhadap tradisi Islam (*critical engagement*) dan juga menyikapi modernitas (*multiple critique*). Setiap produk pemikiran agama (ijihad) sebagaimana halnya juga konstruk sosial dan budaya serta struktur-struktur yang berdampak kepada dehumanisasi, penodaan terhadap kemuliaan-intrinsik manusia, ketidakadilan, dan kekerasan dilawan oleh mereka.

Penulis memahami Islam Progresif sebagai negasi atas liberalisme Islam dan mencoba mendefinisikannya sebagai Islam

berorientasi pembebasan yang sumbernya digali dari persilangan antara ajaran Islam, kearifan lokal, dan kritik sosial.

Islam Progresif adalah suatu gugus bagi gerakan-gerakan Islam. Suatu gugus gerakan yang berinspirasi ajaran Islam pembebasan, yang menerjemahkan ajaran tersebut ke dalam suatu praksis tertentu yang berbeda dari praktik liberalisme Islam, fundamentalisme Islam, dan moderatisme Islam. Untuk melihat praktik ini lebih jernih, lihat ke mana orientasinya. Orientasi isme-isme ini berkisar antara tiga hal: negara, pasar, masyarakat. Liberalisme Islam berorientasi pada pasar, mensubordinasikan negara dan masyarakat di bawah pasar. Fundamentalisme Islam berorientasi pada negara (melalui doktrin *kebilafah*), mensubordinasikan pasar dan masyarakat di bawah negara. Moderatisme Islam berorientasi pada keseimbangan di antara ketiganya, namun pada gilirannya terjatuh pada subordinasi masyarakat terhadap negara (melalui doktrin ketaatan umat atas pemerintah, *ulil amr*) dan pasar.

FNKSDA dan NU

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan di bidang ekonomi untuk “mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat” sudah sepatutnya memiliki sikap terhadap persoalan ini. Terlebih-lebih, dalam banyak kasus konflik SDA di Indonesia warga NU seringkali menjadi korban langsung. Misalnya, kasus Lumpur Lapindo di Porong, penanaman dinamit untuk melakukan survei seismik oleh Exxon di Jombang, konflik warga dengan perusahaan migas di Sumenep, konflik air antara warga dengan PT Aqua Danone di Klaten dan Jombang, konflik warga dengan tentara di Pucanglaban Tulungagung dan perusahaan tambang di Kebumen, dan lain-lain.

Selain permasalahan meluasnya konflik, hal yang tak kalah penting untuk didiskusikan adalah Penguatan korporasi yang dalam beberapa kasus (misalnya: Lumpur Lapindo) sudah nyata melebihi kekuatan negara. Triad (Negara, korporasi, masyarakat) yang tadinya

diimajinasikan memiliki kekuatan yang setara dengan negara sebagai regulator, pada kenyataannya tidaklah demikian. Korporasi memiliki kekuatan paling besar, diikuti oleh negara yang seringkali tunduk pada korporasi dan masyarakat dalam posisi yang paling lemah. Hukum bukan Cuma tidak ditegakkan, tetapi sudah menjadi bagian dari bagian penyuksesan penetrasi korporasi ini.

Sejauh ini Pengurus Besar PBNU kurang memberikan perhatian terhadap permasalahan seperti ini. Misalnya, dibuktikan dengan tidak adanya badan yang secara serius mengurus permasalahan ini di dalam struktur organisasi PBNU. Di lain sisi, konflik SDA dengan pola yang hampir sama sudah sangat banyak terjadi dan memerlukan solusi terpadu. Karena itu, Diskusi Nahdliyin tentang Konflik dan Tata Kelola SDA yang telah dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2013 adalah langkah awal untuk merumuskan agenda NU di Bidang ini. Baik ia akan masuk di struktur NU ataupun sama sekali di luar.

Sebenarnya persoalan seperti ini pernah diperbincangkan di lingkungan NU. Konferensi Besar (Konbes) di Cirebon, PBNU di bidang ekonomi merekomendasikan “renegosiasi kontrak-kontrak karya pertambangan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi pemasukan Indonesia dan kesejahteraan warga”.

Elemen lain yang dekat dengan NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Malah memiliki tuntutan yang lebih tinggi. Pada tahun 2012 PMII menuntut dilakukannya nasionalisasi terhadap aset pertambangan dan energi.¹¹ Sementara, Ikatan Sarjana Nahdlatul

¹¹ Pernyataan PB PMII menyangkut nasionalisasi ada di banyak laman di internet, antara lain: 1]Anam, A.K. (redaktur), 23/05/2013. PMII Desak Menteri BUMN Nasionalisasi Tambang. Berita ini dapat dibaca di: <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,38069-lang,id-c,nasional-t,PMII+Desak+Menteri+BUMN+Nasionalisasi+Tambang-.phpx>, diakses pada tanggal 24/05/2017; dan 2]Rasyid, Y., 31/03/2013. Mahasiswa Yogya Tuntut Nasionalisasi Migas. Berita ini dapat dibaca di: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/12/03/31/m1qn2r-mahasiswa-yogya-tuntut-nasionalisasi-perusahaan-migas>, diakses pada tanggal 24/05/2017.

Ulama (ISNU), menyatakan bahwa tujuan akhir dari tata kelola energy adalah kedaulatan dan ketahanan energy nasional.¹² Akan tetapi secara organisatoris, hampir tidak ada gelombang advokasi yang massif dari kelompok NU terhadap warga yang mengalami persoalan konflik SDA. PBNU sendiri lebih banyak bermain di level regulasi seperti *judicial review* UU Migas, tetapi tidak banyak mendorong pengurus untuk turun ke bawah. Diskusi Nahdliyin tentang Konflik dan Tata Kelola Sumber Daya Alam SDA yang sudah diselenggarakan pada tanggal 4 Juli 2013 bertempat di Pendopo LkiS, Yogyakarta, pada dasarnya diinisiasi oleh kelompok intelektual organik NU yang memiliki kepedulian mengenai permasalahan ini. Diskusi dihadiri dari personal yang bekerja sebagai akademisi, aktivis sosial atau pengurus NU sendiri. Dalam diskusi ini telah hadir utusan dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki permasalahan dengan konflik SDA. Utusan-utusan tersebut meliputi Jombang, Pati, Porong, Cirebon, Batang, Kebumen, Kulon Progo, Mandailing Natal, Tenggarong, dan Mojokerto. Para Utusan yang hadir ada yang merupakan kelompok langsung yang terkena imbas dari adanya konflik SDA di daerah daerah di atas dan aktivis yang tergabung dalam berbagai lembaga/instansi yang berhubungan dengan NU.

Dari diskusi tersebut, selain pembahasan mengenai permasalahan dimasing-masing simpul, Telah diperoleh kondisi obyektif keindonesiaan, bahwa penetrasi aktor (nasional dan global) kepedalaman melalui sektor industri ekstraktif —galian C, pembangkit listrik, minerba, migas, Dan air— sudah sangat intens. Dalam beberapa kasus, kaum tani berada dalam posisi yang *vis a vis* dengan korporasi karena perebutan akses terhadap dan kontrol atas sumberdaya. Sikap elit NU terbelah. Dalam kasus di Kebumen ada bagian NU yang berpihak kepada tuntutan warga, sementara di kasus

¹² ISNU, *Tambang untuk Rakyat*, dalam Syeirazi, M.K. (editor), 2013. *Kebangkitan Bangsa Indonesia 1945-2045: Pokok-pokok pikiran sarjana Nahdlatul Ulama*. LP3ES, Jakarta, 51F79. Lebih jauh, dalam buku ini ISNU mendukung dilaksanakannya reforma agraria

Pati elit NU berpihak kepada kepentingan korporasi dapat dilihat di: Lampiran Kasus Pegunungan Kendeng Utara)¹³ dan di beberapa kasus yang lain seperti di Tenggara elit NU tidak belum memiliki sikap yang jelas. Para peserta pertemuan sepakat bahwa para utusan yang hadir membutuhkan sebuah wadah untuk terus menerus menghiraukan permasalahan konflik SDA.

Strategi Gerakan FNKSDA Didalam Upaya Mencapai Agenda-agenda Organisasi

Dalam menjalankan aktivitasnya ada beberapa panduan pokok yang dipakai oleh FNKSDA. Panduan pokok itu meliputi isu yang akan direproduksi, kerangka analisis, dan metode gerak. Isu yang akan direproduksi terdiri adalah keselamatan warga dan kedaulatan pangan sementara ekologi dan bencana industri akan dipakai sebagai kerangka analisis pada setiap kasusnya dan silaturrahi akan menjadi metode dalam membangun gerakan dan merebut simpati khalayak yang lebih luas.

Membangun pengetahuan baru pada dasarnya adalah salah satu proyek yang sangat penting dalam FNKSDA. Salah dua isu yang sangat mungkin direproduksi adalah isu "*keselamatan warga*" dan "*kedaulatan pangan*". Keselamatan warga menjadi sangat masuk akal dijadikan sebagai salah satu materi kampanye apabila berkaca dari kasus bencana industri Lumpur Lapindo. Hal inilah yang sudah dilakukan di Jombang dalam kasus Exxon.

Kedaulatan pangan pada intinya adalah jaminan terhadap kebutuhan pangan dengan kepedulian terhadap asal-usul bahan pangan tersebut. Kondisi faktual bahwa warga Nahdliyin sebagian besar adalah

¹³Suara arus bawah NU muncul dari pengurus NU Kecamatan Gabus yang menolak pendirian Pabrik Semen Gresik di Pati. Lebih jauh tentang ini dapat disimak di: Kodi, M. 2009. Cara NU Gabus Tolak Pendirian Pabrik Semen Gresik. Ada di <http://www.desantara.or.id/01-2009/139/cara-nu-gabus-tolak-pendirian-pabrik-semen-gresik/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2017. Contoh keberpihakan kiyai-kiyai NU terhadap korporasi dapat dilihat misalnya dari munculnya fenomena kiyai migas di Madura, yaitu kiyai-kiyai yang memuluskan jalan perusahaan minyak dan gas (migas) di Madura untuk membebaskan lahan

kaum tani. Kaum tani pada dasarnya menyuplai beras untuk masyarakat di Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di kota. Apabila penyuplai bahan pangan berada dalam kondisi kritis, maka otomatis kalangan yang disuplai pun akan berada dalam kondisi kritis.

Lebih jauh, isu keselamatan warga dan ketahanan pangan ini dapat dibingkai dengan kerangka analisis ekologi dan bencana. Cara pandang ekologi akan membantu untuk melihat persoalan secara runtut dan saling terkoneksi (ekosistemik). Sementara, kerangka bencana akan meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam hal ini yang bersifat industrial.

Perspektif-perspektif di atas pada akhirnya harus diturunkan ke dalam metode gerak yang dinilai paling memungkinkan dilakukan di kalangan NU: silaturahmi. Dalam melakukan silaturahmi awal, harus terlebih dahulu kepada pengurus NU (PC, PW, atau PB) yang ditemui belum bersikap dalam sebuah kasus konflik SDA, atau kalau sudah bersikap pengurus NU terkait berada dalam barisan kepentingan warga. Daerah-daerah yang sudah panas seperti Kendeng, Pati dan Banyuwangi, dimana ada elit NU lokal yang berpihak kepada korporasi sebaiknya ditunggu dulu sampai FNKSDA mengalami kematangan. Apabila secara politik dirasa sudah matang, maka FNKSDA akan mengambil langkah progresif yang dibutuhkan dalam menyadarkan kelompok NU yang sudah bersikap kontra jamaah. Setiap simpul daerah yang tergabung dalam FNKSDA bisa mengadakan halaqoh SDA dan memobilisasi jaringan FNKSD untuk berpartisipasi. Kegiatan ini sekaligus untuk mempersempit ruang gerak elit NU yang sudah mengambil langkah kontra jamaah dengan cara misalnya, mengajak anak-anak muda NU untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan halaqoh SDA.

Diseminasi Wacana dan Gerakan Melalui Media

Menurut Antonio Gramsci, Media sebagai ruang dimana berbagai Ideologi direpresentasikan. Ini berarti, di satu sisi media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik. Namun di sisi lain, media juga bisa

menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan. media bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi dominan bagi kepentingan kelas dominan, sekaligus juga bisa menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.

Dalam aktivitas politik, ruang siber dan ruang fisik memiliki hubungan yang saling bergantung (*interdependent*) antara satu dengan yang lain. Maksudnya, satu dimensi dapat membangkitkan, memperkuat, melemahkan, atau bahkan membunuh dimensi yang lain. Poin pentingnya adalah manfaat media sosial dalam aktivitas politik sangat bergantung pada siapa dan bagaimana masyarakat Internet (*netizen*) menggunakan media.

Sebagai bagian dari ruang siber, media sosial ikut memiliki enam karakteristik kunci sebagaimana disebutkan oleh Mitra dan Cohen¹⁴. Keenam karakter media sosial antara lain: 1) *intertextuality*, artinya setiap teks memiliki tautan pada teks yang lainnya. Dengan demikian, makna teks tidak bisa berdiri sendiri. Teks harus dimaknai bersama-sama dengan teks lain yang masih berkaitan, baik teks pada masa lampau maupun teks masa kini. Hal ini berkaitan dengan makna pesan dalam media sosial. Suatu kiriman (*posting*), komentar (*comment*) baru memiliki makna ketika dikaitkan dengan kiriman, komentar, atau. 2) *Nonlinearity*, artinya setiap halaman situs, atau komentar tidak dapat diketahui mana awal dan akhirnya. Bisa saja kicauan terakhir menjadi topik obrolan yang baru. Selanjutnya, 3) Terdapat distingsi yang kabur antara pembaca dan penulis (*blurring the reader/writer distinction*). Pengguna media mengkonstruksi teks melalui akses pada setiap tautan yang berkaitan. Adapun akses terhadap konten tidak bisa dikontrol oleh penulisnya. Hal ini berkaitan dengan karakter netizen sebagai *user-content-generated*, artinya pengakses memproduksi konten, mendistribusikannya, sekaligus menjadi konsumen dari konten itu. Karakter 4) *multimediansess* yaitu adanya konvergensi antara media,

¹⁴ Nasrullah. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

gambar, suara, dan teks di media sosial. Misalnya, teks yang ada di *website* juga bisa disertakan dengan gambar atau tautan (link) sehingga konten mengandung lebih banyak karakter. 5) Sifat internet global membuat konten dapat disebar dan diakses secara luas tanpa ada batasan ruang dan waktu secara cepat. Pesan tidak hanya disebar ke satu orang, tetapi langsung ke banyak orang tanpa melalui gatekeeper layaknya media arus utama. Terakhir, 6) *ephemerality* bahwa teks di media tidak stabil karena bisa saja dihilangkan oleh penggunaanya.

Jika ditilik dengan lebih seksama, karakter media dapat dikelompokkan menjadi dua dimensi, yakni dimensi konten serta dimensi khalayak. Dimensi konten berkaitan dengan *intertextuality*, *nonlinearity*, *multimedialness*, dan *ephemerality*. Sedangkan dimensi khalayak berkaitan dengan *user-generated-content*, dan *global*. Dua dimensi ini akan menjadi fokus peneliti saat melihat bagaimana aktivitas media sosial dalam gerakan. Aktivitas media dimaknai sebagai strategi gerakan. Strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu.¹⁵ Sehingga, penggunaan media memang sengaja ditetapkan sebagai salah satu bentuk alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan gerakan.

Setelah melihat berbagai gerakan yang berhasil disebar melalui media, terlihat pola yang sama bahwa transformasi strategi dari aktivitas media ke gerakan nyata terjadi akibat peluang dalam struktur politik negara. Misalnya saja keterbukaan sistem politik yang berimbas pada kemudahan akses terhadap teknologi Internet. Media sosial tentu tidak dapat berperan dalam gerakan jika berhadapan dengan rezim otoriter. Rezim otoriter dapat dengan mudah memutus arus teknologi informasi sehingga akses tidak tersedia bagi masyarakat kelas menengah. Dengan demikian, peluang

¹⁵ Chandler dalam Singh, Rajendra. 2002. "Teori Gerakan Sosial Baru". Dalam Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif No. XI.

politik menjadi salah satu aspek penting dalam pemanfaatan media sebagai strategi gerakan.

Sehingga, semakin jelas bahwa strategi gerakan sosial tidak hanya berfokus pada akto gerakan tetapi juga struktur. Rasionalitas aktor gerakan mampu menangkap realitas, menghasilkan keluhan baru, serta menyebarkannya melalui konten media untuk mobilisasi kesadaran kolektif dan dukungan. Di saat yang sama, sistem politik menyediakan peluang maupun hambatan dalam perkembangan gerakan itu sendiri.

Alasan penggunaan media sebagai strategi gerakan semestinya tidak bisa dilihat hanya sebagai hasil dari pilihan rasional para aktor gerakan. Hal ini karena seseorang bertindak atas dasar keyakinan dan preferensi mereka. Adapun keyakinan dan preferensi tersebut tidak dapat lepas dari fakta objektif tentang mereka seperti kelas sosial, ras, atau posisi institusionalnya.¹⁶ Berlawanan dengan kaum rasionalis dan positivis, aktivitas politik harus dijelaskan oleh kebijaksanaan dan klaim moral dalam tradisi perilaku yang relevan. Dengan demikian, setiap tindakan dapat dijelaskan melalui pandangan awam atas kehidupan sehari-hari, atau yang disebut sebagai *life world of everyday common sense*. Di sisi lain, sejumlah aktivitas media sosial terbukti mampu membangkitkan aksi di dunia nyata. Keberhasilan ini bukan semata-mata pengaruh dari media secara mandiri (*independent*), melainkan dipengaruhi pula oleh konteks sejarah politik suatu masyarakat dalam upaya perebutan kekuasaan. Asumsi peneliti, aktivitas media dapat dijelaskan melalui pandangan awam para aktor gerakan terhadap media dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari.

¹⁶ Marsh, David & Gerry Stoker. 2002. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Helmi Mahadi dan Shohifullah (Terj.). (Bandung: Nusa Media), 161.

Daftar Pustaka

- Chandler dalam Singh, Rajendra. 2002. *“Teori Gerakan Sosial Baru”*. Dalam Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif No. XI.
- Dawam Raharjo, *Pembangunan Pasca Modernis: Esai-esai ekonomi politik*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Erwin Edaryanta, *Politik Air di Indonesia: “Sejarah Si Gedbang oleh Korporasi Aqua Danone”*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2007
- Farish A Noor, *Islam Progresif: Peluang, Tantangan, dan Masa Depan di Asia Tenggara*. Terj. Moch. Nur Ichwan dan Imron Rosyadi. Yogyakarta: SAMHA, 2006
- Hasil wawancara dengan Roy Murtadlo pada 18 Nopember 2016
- ISNU, *Tambang untuk Rakyat*, dalam Syeirazi, M.K. (editor), 2013. *Kebangkitan Bangsa Indonesia 1945-2045: Pokok-pokok pikiran sarjana Nahdlatul Ulama*. LP3ES, Jakarta, 51F79. Lebih jauh, dalam buku ini ISNU mendukung dilaksanakannya reforma agraria
- Nasrullah. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, (Jakarta: Kencana, 2014
- Nanang Kurniawan, *“Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia”* Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM. 2012 vol 16.
- Najib Burhani, <http://nu1926.blogspot.co.id/2010/08/post-tradisionalisme-sebagai-alternatif.html> diakses pada 20 Mei 2017
- Mansour Fakhri, *Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002
- Marsh, David & Gerry Stoker. 2002. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Helmi Mahadi dan Shohifullah (Terj.). (Bandung: Nusa Media
- <http://regional.kompas.com/read/2016/04/07/14013651/Buktikan.Klaim.sebagai.Ormas.Terbesar.NU.Terbitkan.Kartu.Anggota.Nasional> diakses pada 21 Mei 2017